



MODUL AJAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI PROGRAM BK

*Oleh
Fathur Rahman*



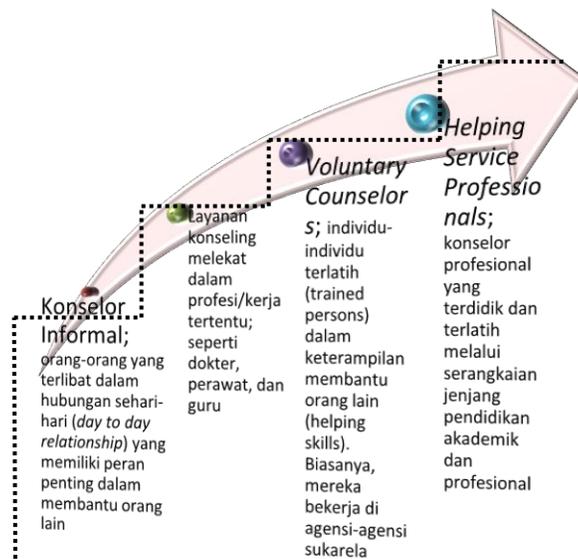
**PENDIDIKAN PROFESI GURU BIMBINGAN DAN
KONSELING/KONSELOR (PPGBK)
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

BAB I

MODEL DAN POLA LAYANAN BK DALAM LINTASAN SEJARAH

PENDAHULUAN

Guidance and Counseling atau yang lazim dikenal sebagai Bimbingan dan Konseling (disingkat: BK) di Indonesia sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1960-an. Pencangkokkan layanan BK secara resmi dalam sistem pendidikan baru dimulai pada tahun 1975, yakni dengan dicantumkannya pelayanan tersebut pada Kurikulum 1975. Ruang lingkup implementasinya pun mulai diperluas untuk jenjang SD, SLTP, dan SLTA. Dalam perkembangan selanjutnya, Surat Keputusan (SK) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) No. 026 tahun 1989 menyebutkan secara eksplisit bahwa pekerjaan BK dan pekerjaan mengajar berkedudukan seimbang dan sejajar. Melalui keputusan tersebut, tugas pokok seorang guru selain mengajar juga dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling.



Gambar 1. Spektrum Layanan Bimbingan dan Konseling; Dari Tidak Profesional Menuju Profesional

Gambar di atas merupakan suatu ilustrasi tentang perkembangan spektrum layanan bimbingan dan konseling yang berkembang dari waktu ke waktu, baik dalam ruang lingkup persekolahan maupun masyarakat luas. Awalnya, istilah konselor sering dilekatkan pada orang yang dianggap memiliki kemampuan dan peran penting dalam membantu orang lain, seperti penasihat, ustadz, pendakwah, pastor, dan sebagainya. Istilah profesi konselor juga dalam perkembangannya kemudian menjadi profesi yang melekat dalam tugas pokok bagi kalangan yang bergerak dalam bidang pekerjaan yang bersifat membantu orang lain, seperti dokter, perawat, dan guru.

Arus besar industrialisasi yang berdampak pada terbukanya proliferasi peran dalam berbagai bidang pekerjaan telah menempatkan profesi konselor bukan lagi sebagai tugas tambahan yang sekedar ditempelkan pada tugas pokok lainnya. Namun, ada tuntutan yang dikehendaki oleh pengguna jasa layanan bantuan bahwa seorang konselor yang profesional haruslah memiliki rekam jejak pendidikan akademik dan pendidikan profesional di bidang bimbingan dan konseling. Dewasa ini tugas-tugas pokok pelayanan BK tidak lagi ditangani secara sambilan oleh guru-guru sekolah yang *notabene* adalah pengampu bidang studi-bidang studi tertentu. Kategorisasi “pendidik” di ruang lingkup pendidikan selain guru bidang studi dan guru wali kelas (dapat diposisikan sebagai guru pembimbing), juga bertambah luas dengan diperkenalkannya profesi guru BK sebagai bagian dari komponen pendidik (pengakuan eksistensi profesi bimbingan dan konseling ini sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas No. 20/2003 Pasal 1 ayat 6 dan Permendiknas No. 27/2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor).

Seiring perkembangannya itu, beragam harapan dan optimisme banyak disandangkan pada guru-guru BK yang dapat membawa angin segar perubahan dalam suasana dan proses pendidikan di sekolah. Fokus kerjanya jelas dan tegas, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Ivey dan Goncalves (1987), menghadapi kemungkinan-kemungkinan munculnya *psychological problems* dalam kehidupan siswa dan proses tumbuh-kembang siswa dalam konteks pendidikan. Begitu pula dalam halnya dalam konteks kebijakan yang tertuang dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam pendidikan formal di Indonesia (Dikti, 2008) dijelaskan bahwa jika di dalam Permendiknas No. 23/2006 dirumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran bidang studi, maka kompetensi peserta didik yang harus dikembangkan melalui pelayanan bimbingan dan konseling adalah *kompetensi kemandirian* untuk mewujudkan diri (*self actualization*) dan pengembangan kapasitasnya (*capacity development*) yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan. Begitu

pula sebaliknya, kesuksesan peserta didik dalam mencapai SKL akan secara signifikan menunjang terwujudnya pengembangan kemandirian.

Tuntutan yang dihadapi oleh guru bimbingan dan konseling saat ini sangatlah kompleks. Kita seluruhnya sudah mafhum bahwa bimbingan dan konseling sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang holistik. Tujuan utama layanan BK di sekolah adalah memberikan dukungan pada pencapaian kematangan kepribadian, keterampilan sosial, kemampuan akademik, dan bermuara pada terbentuknya kematangan karir individual yang diharapkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Selama beberapa tahun terakhir ini, berbagai upaya yang dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut telah memunculkan paradigma baru tentang model layanan bimbingan dan konseling yang ideal, yaitu bimbingan dan konseling sekolah komprehensif. Diskursus tentang model Bimbingan dan Konseling Komprehensif (selanjutnya disebut BKK) selama kurang lebih satu dekade terakhir telah menjadi tanda tanya besar tidak hanya di kalangan praktisi layanan BK di sekolah, tetapi juga seolah diragukan oleh beberapa kalangan akademisi BK. Gelombang besar BKK yang diwacanakan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia tersebut setidaknya-tidaknya telah menimbulkan gesekan dan tarik-menarik yang cukup kuat di kalangan elit organisasi profesi (bahkan melibatkan elit birokrasi di pemerintahan) dalam kaitannya dengan kebijakan praktis yang akan diberlakukan di institusi pendidikan (sekolah). Tanpa dapat dibendung, wacana BKK tersebut terus menggeling jauh walaupun dengan “dukungan setengah hati” dari birokrat pendidikan. Harus diakui bahwa pada akhirnya dinamika perkembangan profesi bimbingan dan konseling lebih banyak diwarnai interupsi dan intervensi oleh pihak-pihak yang berpikir sempit dan pragmatis.

BIMBINGAN DAN KONSELING KOMPREHENSIF DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Harus diakui bahwa kelahiran dan perkembangan konsep serta paradigma layanan bimbingan dan konseling di Indonesia tidak lain merupakan replikasi dan adopsi model yang telah berkembang sejak lama di Amerika Serikat (*atau lebih tepatnya made in America?*). Pemahaman tentang bimbingan dan konseling (selanjutnya baca; BK) sebagai suatu sistem dan kerangka kerja kelembagaan tidak dapat dilepaskan dari pandangan umum bahwa layanan BK merupakan bagian integral dari sistem pendidikan. Di Amerika Serikat, latar kelahiran BK di awal abad 20 bermula dari keprihatinan yang mendalam dari

kalangan dunia pendidikan terhadap carut-marutnya perkembangan kepribadian generasi muda terutama kalangan pelajar di sekolah yang terkena dampak gelombang besar industrialisasi di kota-kota besar; jumlah siswa drop-out meningkat (kaum muda lebih memilih bekerja ketimbang sekolah, sementara keterampilan kerja tidak memadai), pergeseran nilai dalam keluarga dan masyarakat, urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota, dan problem-problem sosial yang lain (Gysbers & Henderson, 2006).

Kenyataan tersebut akhirnya memicu tumbuhnya layanan bimbingan dan konseling sebagai suatu gerakan sosial yang selaras dengan gerakan kemajuan (*progressive movement*) yang berkembang dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat pada saat itu yang dipelopori oleh tokoh-tokoh pendidikan saat itu, seperti Frank Parsons, Charles Merrill, Meyer Blommfield, Jesse B. Davis, Anna Reed, E. W. Weaver dan David Hill (Gysbers & Henderson, 2006; Gunawan, 2001). Para tokoh tersebut sama-sama memandang secara kritis bahwa gelombang revolusi industri yang membawa dampak negatif bagi perkembangan generasi muda harus dicegah.

Gerakan bimbingan yang muncul di AS dalam bentuk bimbingan pekerjaan (*vocational guidance*) tersebut membawa pengaruh besar terhadap banyak negara lainnya, seperti Filipina, Malaysia, India, dan tidak terkecuali Indonesia.

Gunawan (2001, 22) menjelaskan bahwa pada periode awal kemerdekaan masalah bimbingan pekerjaan baru diperhatikan oleh jawatan yang mengurus masalah tenaga kerja. Kegiatan bimbingan kemudian dikembangkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan mengembangkan banyak kursus keterampilan bagi kaum muda. Baru pada tahun 1962, ada kebijakan SMA Gaya Baru yang mulai menggeser bimbingan pekerjaan ke arah bimbingan akademik. Secara formal, pemberlakuan kurikulum 1975 mengandung penegasan bahwa BK (saat itu disebut bimbingan dan penyuluhan) merupakan bagian integral dalam pendidikan di sekolah. Lahirnya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) tahun 1975 di Malang, Jawa Timur dan pergantian nama IPBI menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) tahun 2001 dengan kelengkapan divisi-divisi layanan di dalamnya semakin memperkuat layanan BK dengan berbagai domain layanan yang semakin kompleks; pribadi, sosial, akademik, karir dan layanan pendukung lainnya.

Sementara itu, inisiatif pengembangan model BKK tidak lepas dari pengaruh gelombang reformasi sekolah (*school reform movement*) yang terjadi di Amerika Serikat sekitar tahun 1980-an sampai dengan 1990-an (Brown & Trusty, 2005). Pada tahun 1983, Komisi Nasional Pendidikan di Amerika Serikat saat itu mempublikasikan rekomendasi yang

membuat publik tersentak kaget; *A Nation at Risk and The Imperative of Educational Reform* (Negara dalam Bahaya; Pentingnya Reformasi Pendidikan). Beberapa komisioner pendidikan menjelaskan bahwa siswa-siswa di Amerika Serikat telah tertinggal jauh dari siswa-siswa yang ada di Eropa Barat dan negara-negara pasifik lainnya dalam hal prestasi akademik. Fenomena tersebut disebabkan oleh rendahnya standar akademik yang harus dicapai, sebagian besar guru tidak memiliki inspirasi, dan kurikulum yang tidak berkembang optimal (Brown & Trusty, 2005). Dalam hal moral, sekolah-sekolah menengah di Amerika Serikat berhadapan dengan tingginya kekerasan di kalangan pelajar, kenaikan rata-rata kehamilan siswa di luar nikah, dan sebagainya. Inilah kenyataan yang terjadi di negeri yang dianggap sebagai kampiun dalam demokrasi dan pendidikan. Di tengah kecaman dunia internasional, terpilihnya George W. Bush pada tahun 2000 setidaknya memberi angin segar bagi masa depan reformasi pendidikan di Amerika Serikat. Di masa Bush, kongres AS telah mengamandemen Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah (*Elementary and Secondary Act*) dan melahirkan UU yang berpihak pada anak (*No Child Left Behind Act*).

Sampai dengan diterbitkannya UU tersebut, Gysbers mengamati bahwa sebagian besar konselor sekolah di Amerika Serikat lebih banyak disibukkan oleh dan menghabiskan waktu untuk tugas dan kewajiban yang tidak profesional. Penelitian yang dilakukan oleh ASCA (*American School Counselor Association*) menunjukkan bahwa sebagian besar konselor sekolah menghabiskan waktu antara 1 sampai 88% dari keseluruhan waktu bekerja hanya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak profesional dan tidak ada kaitannya langsung dengan layanan bimbingan dan konseling (Brown & Trusty, 2005). Tugas-tugas yang tidak profesional tersebut menurut ASCA, seperti kegiatan pendaftaran dan mengatur penjadwalan siswa baru (*registering and scheduling*), menangani problem kedisiplinan siswa di sekolah, pengaturan berlebihan dalam hal seragam sekolah, mengerjakan tugas klerikal dan administratif, bahkan sampai dengan menggantikan tugas guru dalam mengajarkan mata pelajaran atau subjek tertentu di luar bidang layanan BK.

Di tengah arus deras reformasi pendidikan, berbagai organisasi profesi bidang layanan BK yang ada di negeri Paman Sam tersebut memandang bahwa reformasi yang terjadi merupakan kesempatan emas untuk mereposisi program bimbingan dan konseling sebagai bagian penting dari misi pendidikan (sekolah) dalam mendukung pencapaian prestasi akademik dan fasilitasi tugas perkembangan siswa di berbagai aspek. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari fenomena yang terjadi di Amerika Serikat tersebut, yaitu paradigma dan implementasi model BKK merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari gelombang reformasi sekolah yang terjadi saat itu.

Lalu, bagaimana dengan sejarah kita sendiri? Tidak sepenuhnya kita dapat membaca dan menganalisis sejarah ke-BK-an yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena profesi bimbingan dan konseling kita sekarang ini belum memasuki fase historis, sebab kita sebagai pelaku sejarah masih mengalami proses untuk membangun visi dan aksi layanan bimbingan dan konseling yang kokoh di masa mendatang.

Walaupun demikian, pada dasarnya warna dan nuansa dunia pendidikan kita (termasuk layanan bimbingan dan konseling) tidak lepas dari momentum, peristiwa penting, dan konstelasi sosial-politik yang telah hadir di Indonesia. Sejarah hanya dapat ditulis berdasarkan rangkaian peristiwa yang saling berhubungan, tidak terkecuali sejarah pendidikan dan perkembangan layanan profesional bimbingan dan konseling. Dewasa ini, kita seolah-olah tengah mereplikasi sejarah Amerika. Selama lebih dari satu dekade, bangsa Indonesia tengah memasuki masa reformasi di berbagai bidang, tidak terkecuali pendidikan. Semangat reformasi dalam bidang pendidikan tersebut ditandai oleh keprihatinan yang mendalam seluruh pihak terhadap rendahnya indeks kualitas pembangunan sumber daya manusia yang dilansir oleh berbagai media pemeringkatan internasional, angka partisipasi pendidikan yang rendah, beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan beberapa daerah lainnya bahkan diidentifikasi sebagai “kantong merah” buta aksara, kesenjangan sarana dan prasarana serta kualitas pendidikan di berbagai daerah di tanah air, dan sebagainya.

Prof. Dedi Supriadi (Mulyana, 2004) pernah mengatakan bahwa sejak Indonesia merdeka tahun 1945 dan bahkan sejak program-program Repelita dimulai tahun 1969/1970 tatkala pembangunan pendidikan mulai dilaksanakan dengan serius, baru 4-5 tahun terakhir ini (2005-2009) sejak reformasi bergulir tahun 1998 merupakan periode yang paling padat perubahan. Beberapa perubahan yang mendominasi panggung pendidikan selama tahun-tahun tersebut, seperti Pendidikan Berbasis Luas, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Manajemen Berbasis Sekolah, Ujian Akhir Nasional (UAN) yang menggantikan EBTANAS, pembentukan Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Tahun 2003 bisa jadi merupakan salah satu tahun puncak perubahan tersebut dengan lahirnya UU No 20/Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lalu diikuti dengan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dan berbagai perangkat peraturan pemerintah dan menteri yang memberi penjabaran lebih luas tentang berbagai perubahan-perubahan dimaksud.

Belakangan mulai muncul label-label perubahan yang berseliweran tanpa terkendali; manajemen berbasis sekolah (*school-based management*), peningkatan mutu berbasis sekolah (*school-based quality improvement*), belajar berbasis komputer (*learning-assisted*

computer). Sepanjang tahun 2006 dan akhir 2009 ini, energi seluruh pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan terkuras habis dalam menghadapi proyek nasional dalam skala besar yang melibatkan berbagai kepentingan; Sertifikasi Guru dalam berbagai varian dan bentuk. Pertanyaan lebih lanjut, apakah perubahan-perubahan itu dapat dianggap sebagai tonggak bersejarah telah terjadi reformasi pendidikan (sekolah)?

Dalam konteks itu semua, peran bimbingan dan konseling semakin eksis dan diakui secara eksplisit dalam arus besar perubahan dimaksud. Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah, yang dulunya lebih dikenal sebagai kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan (BP), dewasa ini semakin penting dan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang holistik. Tujuan utama layanan BK di sekolah adalah memberikan dukungan pada pencapaian kematangan kepribadian, keterampilan sosial, kemampuan akademik, dan bermuara pada terbentuknya kematangan karir individual yang diharapkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

TUGAS

Diskusikanlah dalam kelompok kecil perkembangan model dan pola layanan bimbingan dan konseling yang muncul selama rentang waktu 1975 sampai dengan 2010. Kajiilah berbagai latar belakang yang melatari munculnya model tersebut, siapa pelopornya, dan garis besar model/pola yang dimaksud, termasuk pula kelebihan, kekurangan, dan berbagai kendala pelaksanaannya



FILOSOFI DAN HAKIKAT BIMBINGAN DAN KONSELING SEKOLAH KOMPREHENSIF

Bercermin pada latar sejarah kelahiran dan perkembangan BK tersebut, dewasa ini muncul istilah *comprehensive school guidance and counseling* sebagai kerangka kerja utuh yang harus dipahami oleh tenaga-tenaga ahli di bidang BK (Gysbers & Henderson, 2006; Ming, et. al., 2004; Bowers & Hatch, 2000). Berikut lima premis dasar yang menegaskan istilah tersebut (Gysbers & Henderson, 2006);

1. Tujuan BK bersifat kompatibel dengan tujuan pendidikan. Artinya; dalam pendidikan ada standar dan kompetensi tertentu yang harus dicapai oleh siswa. Oleh karena itu, segala aktivitas dan proses dalam layanan BK harus diarahkan pada upaya membantu siswa dalam pencapaian standar kompetensi dimaksud.
2. Program BK bersifat pengembangan (*based on developmental approach*), yakni; meskipun seorang konselor dimungkinkan untuk mengatasi problem dan kebutuhan psikologis yang bersifat krisis dan klinis, pada dasarnya fokus layanan BK lebih diarahkan pada usaha memfasilitasi pengalaman-pengalaman belajar tertentu yang membantu siswa untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi pribadi yang mandiri.
3. Program BK melibatkan kolaborasi antar staff (*team-building approach*), yaitu program bimbingan dan konseling yang bersifat komprehensif bersandar pada asumsi bahwa tanggung jawab kegiatan bimbingan melibatkan seluruh personalia yang ada di sekolah dengan sentral koordinasi dan tanggung jawab ada di tangan konselor yang bersertifikasi (*certified counselors*). Konselor tidak hanya menyediakan layanan langsung untuk siswa, melainkan juga bekerja secara konsultatif dan kolaboratif dengan tim bimbingan yang lain, staf personel sekolah yang lain (guru dan tenaga administrasi), bahkan orangtua dan masyarakat.
4. Program BK dikembangkan melalui serangkaian proses sistematis sejak dari perencanaan, desain, implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan. Melalui

penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut diharapkan kegiatan dan layanan BK dapat diselenggarakan secara tepat sasaran dan terukur.

5. Program BK ditopang oleh kepemimpinan yang kokoh. Faktor kepemimpinan ini diharapkan dapat menjamin akuntabilitas dan pencapaian kinerja program BK

Bowers dan Hatch (2000, 11) bahkan menegaskan bahwa program bimbingan dan konseling sekolah tidak hanya bersifat komprehensif dalam ruang lingkup, namun juga harus bersifat preventif dalam disain, dan bersifat pengembangan dalam tujuannya (*comprehensive in scope, preventive in design, and developmental in nature*). *Pertama*, bersifat komprehensif berarti program BK harus mampu memfasilitasi capaian-capaian perkembangan psikologis siswa dalam totalitas aspek bimbingan (baik pribadi-sosial, akademik, dan karir). Layanan yang diberikan pun tidak hanya terbatas pada siswa dengan karakter dan motivasi unggul serta siap belajar saja. Layanan BK ditujukan untuk seluruh siswa tanpa syarat apapun. Dengan harapan, setiap siswa dapat menggapai sukses di sekolah dan menunjukkan kontribusi nyata dalam masyarakat.

Kedua, bersifat preventif dalam disain mengandung arti bahwa pada dasarnya tujuan pengembangan program BK di sekolah hendaknya dilakukan dalam bentuk yang bersifat preventif. Upaya pencegahan dan antisipasi sedini mungkin (*prevention education*) hendaknya menjadi semangat utama yang terkandung dalam kurikulum bimbingan yang diterapkan di sekolah (kegiatan klasikal). Melalui cara yang preventif tersebut diharapkan siswa mampu memilah sikap dan tindakan yang tepat dan mendukung pencapaian perkembangan psikologis ke arah yang ideal dan positif. Beberapa program yang dapat dikembangkan seperti pendidikan multikulturalisme dan antikekerasan, mengembangkan keterampilan resolusi konflik, pendidikan seksualitas, kesehatan reproduksi, dan lain-lain.

Ketiga, bersifat pengembangan dalam tujuan didasari oleh fakta di lapangan bahwa layanan bimbingan dan konseling sekolah selama ini justru kontraproduktif terhadap perkembangan siswa itu sendiri. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling sekolah yang berkembang di Indonesia selama ini lebih terfokus pada kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif dan klerikal (Kartadinata, 2003), seperti mengelola kehadiran dan ketidakhadiran siswa, mengenakan sanksi disiplin pada siswa yang terlambat dan dianggap nakal.

Dengan demikian, wajar apabila dalam masyarakat dan bagi siswa-siswa sendiri guru bimbingan dan konseling distigmakan sebagai polisi sekolah. Konsekuensi kenyataan ini, pada akhirnya menyebabkan layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan di

sekolah akhirnya terjebak dalam pendekatan tradisional dan intervensi psikologis yang berorientasi pada paradigma intrapsikis dan sindrom klinis.

Pendekatan dan tujuan layanan bimbingan dan konseling pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan perilaku menyimpang (*maladaptive behavior*) dan bagaimana mencegah penyimpangan perilaku tersebut, melainkan juga berurusan dengan pengembangan perilaku efektif (Kartadinata, 1999; Kartadinata, 2003; Galassi & Akos, 2004).

Sudut pandang perkembangan ini mengandung implikasi luas bahwa pengembangan perilaku yang sehat dan efektif harus dapat dicapai oleh setiap individu dalam konteks lingkungannya masing-masing. Dengan demikian, bimbingan dan konseling seharusnya perlu diarahkan pada upaya memfasilitasi individu agar menjadi lebih sadar terhadap dirinya, terampil dalam merespon lingkungan, serta mampu mengembangkan diri menjadi pribadi yang bermakna dan berorientasi ke depan (Kartadinata, 1999; Kartadinata, 2003).



KOMPONEN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING SEKOLAH

Dalam buku Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan BK dalam Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Depdiknas, 2007) dijelaskan bahwa program BK mengandung empat komponen pelayanan, yaitu 1) pelayanan dasar bimbingan; 2) pelayanan perencanaan individual; 3) pelayanan responsif; dan 4) dukungan sistem. Adapun pengertian tiap-tiap komponen pelayanan tersebut sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar

a. Pengertian

Pelayanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan (yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian) yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya.

Di Amerika Serikat sendiri, istilah pelayanan dasar ini lebih populer dengan sebutan kurikulum bimbingan (*guidance curriculum*). Tidak jauh berbeda dengan pelayanan dasar, kurikulum bimbingan ini diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu dalam diri siswa yang tepat dan sesuai dengan tahapan perkembangannya (Bowers & Hatch, 2000)

Penggunaan instrumen asesmen perkembangan dan kegiatan tatap muka terjadwal di kelas sangat diperlukan untuk mendukung implementasi komponen ini. Asesmen kebutuhan diperlukan untuk dijadikan landasan pengembangan pengalaman terstruktur yang disebutkan.

b. Tujuan

Pelayanan ini bertujuan untuk membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya, atau dengan kata lain membantu konseli agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Secara rinci tujuan pelayanan ini dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu konseli agar (1) memiliki kesadaran (pemahaman) tentang diri dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan agama), (2) mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya, (3) mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya, dan (4) mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya.

c. Fokus pengembangan

Untuk mencapai tujuan tersebut, fokus perilaku yang dikembangkan menyangkut aspek-aspek pribadi, sosial, belajar dan karir. Semua ini berkaitan erat dengan upaya membantu konseli dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya (sebagai standar kompetensi kemandirian). Materi pelayanan dasar dirumuskan dan dikemas atas dasar standar kompetensi kemandirian antara lain mencakup pengembangan: (1) *self-esteem*, (2) motivasi berprestasi, (3) keterampilan pengambilan keputusan, (4) keterampilan pemecahan masalah, (5) keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi, (6) penyadaran keragaman budaya, dan (7) perilaku bertanggung jawab. Hal-hal yang terkait dengan perkembangan karir (terutama di tingkat SLTP/SLTA) mencakup pengembangan: (1) fungsi agama bagi kehidupan, (2) pemantapan pilihan program studi, (3) keterampilan kerja profesional, (4) kesiapan pribadi (fisik-psikis, jasmaniah-rohaniyah) dalam menghadapi pekerjaan, (5) perkembangan dunia kerja, (6) iklim kehidupan dunia kerja, (7) cara melamar pekerjaan, (8) kasus-kasus kriminalitas, (9) bahayanya perkelahian masal (tawuran), dan (10) dampak pergaulan bebas.

2. Pelayanan Responsif

a. Pengertian

Pelayanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Konseling individual, konseling krisis, konsultasi dengan orangtua, guru, dan alih tangan kepada ahli lain adalah ragam bantuan yang dapat dilakukan dalam pelayanan responsif.

b. Tujuan

Tujuan pelayanan responsif adalah membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya atau membantu konseli yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Tujuan pelayanan ini dapat juga dikemukakan sebagai upaya untuk mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi konseli yang muncul segera dan dirasakan saat itu, berkenaan dengan masalah sosial-pribadi, karir, dan atau masalah pengembangan pendidikan.

c. Fokus pengembangan

Fokus pelayanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan konseli. Masalah dan kebutuhan konseli berkaitan dengan keinginan untuk memahami sesuatu hal karena dipandang penting bagi perkembangan dirinya secara positif. Kebutuhan ini seperti kebutuhan untuk memperoleh informasi antara lain tentang pilihan karir dan program studi, sumber-sumber belajar, bahaya obat terlarang, minuman keras, narkotika, pergaulan bebas.

Masalah lainnya adalah yang berkaitan dengan berbagai hal yang dirasakan mengganggu kenyamanan hidup atau menghambat perkembangan diri konseli, karena tidak terpenuhi kebutuhannya, atau gagal dalam mencapai tugas-tugas perkembangan. Masalah konseli pada umumnya tidak mudah diketahui secara langsung tetapi dapat dipahami melalui gejala-gejala perilaku yang ditampilkannya.

Masalah (gejala perilaku bermasalah) yang mungkin dialami konseli diantaranya: (1) merasa cemas tentang masa depan, (2) merasa rendah diri, (3) berperilaku impulsif (kekanak-kanakan atau melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkannya secara matang), (4) membolos dari Sekolah/Madrasah, (5) malas belajar, (6) kurang memiliki kebiasaan belajar yang positif, (7) kurang bisa bergaul, (8) prestasi belajar rendah, (9) malas beribadah, (10) masalah pergaulan bebas (*free sex*), (11) masalah tawuran, (12) manajemen stress, dan (13) masalah dalam keluarga.

Untuk memahami kebutuhan dan masalah konseli dapat ditempuh dengan cara asesmen dan analisis perkembangan konseli, dengan menggunakan berbagai teknik, misalnya inventori tugas-tugas perkembangan (ITP), angket konseli, wawancara, observasi, sosiometri, daftar hadir konseli, leger, psikotes dan daftar masalah konseli atau alat ungkap masalah (AUM).

3. Perencanaan Individual

a. Pengertian

Perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Pemahaman konseli secara mendalam dengan segala karakteristiknya, penafsiran hasil asesmen, dan penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan potensi yang dimiliki konseli amat diperlukan sehingga konseli mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat di dalam mengembangkan potensinya secara optimal, termasuk keberbakatan dan kebutuhan khusus konseli. Kegiatan orientasi, informasi, konseling individual, rujukan, kolaborasi, dan advokasi diperlukan di dalam implementasi pelayanan ini.

b. Tujuan

Perencanaan individual bertujuan untuk membantu konseli agar (1) memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, (2) mampu merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir, dan (3) dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskannya.

Tujuan perencanaan individual ini dapat juga dirumuskan sebagai upaya memfasilitasi konseli untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan sosial-pribadi oleh dirinya sendiri. Isi layanan perencanaan individual adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan konseli untuk memahami secara khusus tentang perkembangan dirinya sendiri. Dengan demikian meskipun perencanaan individual ditujukan untuk memandu seluruh konseli, pelayanan yang diberikan lebih bersifat individual karena didasarkan atas perencanaan, tujuan dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing konseli.

Melalui pelayanan perencanaan individual, konseli diharapkan dapat:

- 1) Mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir, dan mengembangkan kemampuan sosial-pribadi, yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang Sekolah/Madrasah, dunia kerja, dan masyarakatnya.
- 2) Menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuannya.
- 3) Mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya.
- 4) Mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya.

c. Fokus pengembangan

Fokus pelayanan perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial-pribadi. Secara rinci cakupan fokus tersebut antara lain mencakup pengembangan aspek (1) akademik meliputi memanfaatkan keterampilan

belajar, melakukan pemilihan pendidikan lanjutan atau pilihan jurusan, memilih kursus atau pelajaran tambahan yang tepat, dan memahami nilai belajar sepanjang hayat; (2) karir meliputi mengeksplorasi peluang-peluang karir, mengeksplorasi latihan-latihan pekerjaan, memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif; dan (3) sosial-pribadi meliputi pengembangan konsep diri yang positif, dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif.

4. Dukungan Sistem

Ketiga komponen diatas, merupakan pemberian bimbingan dan konseling kepada konseli secara langsung. Sedangkan dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infra struktur (misalnya Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli.

Program ini memberikan dukungan kepada konselor dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan diatas. Sedangkan bagi personel pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di Sekolah/Madrasah. Dukungan sistem ini meliputi aspek-aspek: (a) pengembangan jejaring (*networking*), (b) kegiatan manajemen, (c) riset dan pengembangan.

a. Pengembangan Jejaring (*networking*)

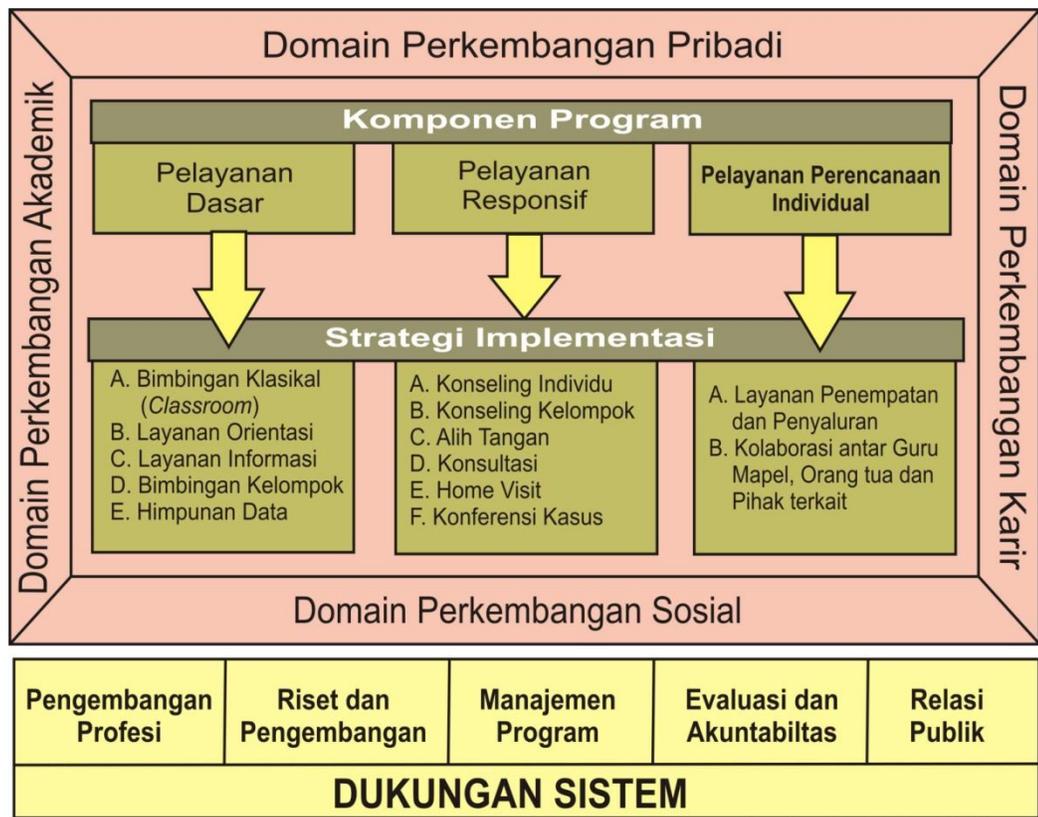
Pengembangan jejaring menyangkut kegiatan konselor yang meliputi (1) konsultasi dengan guru-guru, (2) menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat, (3) berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Sekolah/Madrasah, (4) bekerjasama dengan personel Sekolah/Madrasah lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan Sekolah/Madrasah yang kondusif bagi perkembangan konseli, (5) melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling, dan (6) melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan ahli lain yang terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling.

b. Kegiatan Manajemen

Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan (1) pengembangan program, (2) pengembangan staf, (3) pemanfaatan sumber daya, dan (4) pengembangan penataan kebijakan.

Keempat komponen pelayanan BK yang meliputi pelayanan dasar, perencanaan individual, pelayanan responsive, dan dukungan sistem dapat digambarkan dalam bentuk bagan sederhana berikut ini:

Gambar 2. Pola Program dan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah



Design by Fathur Rahman

Bagan tersebut memberikan gambaran yang jelas bahwa layanan bimbingan dan konseling hendaknya dilakukan untuk membentuk bingkai perkembangan yang utuh mencakup pribadi-sosial, akademik, dan karir. Pengembangan pencapaian tujuan yang bersifat mendukung dan melengkapi hendaknya tidaklah perlu diperdebatkan berkepanjangan, namun harus dilihat sebagai bagian yang terintegrasi dalam empat bidang/domain perkembangan yang ingin dicapai.

Sebagai contoh, jika penyelenggaraan layanan BK di suatu sekolah ingin menekankan pada segi pembentukan karakter dan akhlak mulia, tidaklah perlu menambahkannya ke dalam struktur atau domain perkembangan yang baru atau bahkan menambah bidang bimbingan yang baru. Cukuplah dipahami bahwa satu-kesatuan kecakapan pribadi dan

sosial haruslah bermuara pada terbentuknya karakter yang kuat serta akhlak yang mulia dalam diri siswa.

Strategi pelayanan untuk masing-masing komponen program dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelayanan dasar

- a. Bimbingan Kelas; Program yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Secara terjadwal, konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada para peserta didik. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi kelas atau *brain storming* (curah pendapat).
- b. Pelayanan Orientasi; Pelayanan ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan Sekolah/Madrasah, untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut. Pelayanan orientasi ini biasanya dilaksanakan pada awal program pelajaran baru. Materi pelayanan orientasi di Sekolah/Madrasah biasanya mencakup organisasi Sekolah/Madrasah, staf dan guru-guru, kurikulum, program bimbingan dan konseling, program ekstrakurikuler, fasilitas atau sarana prasarana, dan tata tertib Sekolah/Madrasah.
- c. Pelayanan Informasi; Yaitu pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik. melalui komunikasi langsung, maupun tidak langsung (melalui media cetak maupun elektronik, seperti : buku, brosur, leaflet, majalah, dan internet).
- d. Bimbingan Kelompok; Konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil (5 s.d. 10 orang). Bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini, adalah masalah yang bersifat umum (*common problem*) dan tidak rahasia, seperti : cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, dan mengelola stress.
- e. Pelayanan Pengumpulan Data (Aplikasi Instrumentasi); Merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi peserta didik, dan lingkungan peserta didik. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes.

2. Pelayanan responsif

- a. Konseling Individual dan Kelompok; Pemberian pelayanan konseling ini ditujukan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Melalui konseling, peserta didik

(konseli) dibantu untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, penemuan alternatif pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara lebih tepat. Konseling ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok.

- b. Referral (Rujukan atau Alih Tangan); Apabila konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah konseli, maka sebaiknya dia mereferral atau mengalih tangankan konseli kepada pihak lain yang lebih berwenang, seperti psikolog, psikiater, dokter, dan kepolisian. Konseli yang sebaiknya direferral adalah mereka yang memiliki masalah, seperti depresi, tindak kejahatan (kriminalitas), kecanduan narkoba, dan penyakit kronis.
- c. Kolaborasi dengan Guru Mata Pelajaran atau Wali Kelas; Konselor berkolaborasi dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang peserta didik (seperti prestasi belajar, kehadiran, dan pribadinya), membantu memecahkan masalah peserta didik, dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran. Aspek-aspek itu di antaranya : (1) menciptakan iklim sosio-emosional kelas yang kondusif bagi belajar peserta didik; (2) memahami karakteristik peserta didik yang unik dan beragam; (3) menandai peserta didik yang diduga bermasalah; (4) membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar melalui program *remedial teaching*; (5) mereferral (mengalih tangankan) peserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing; (6) memberikan informasi yang *up to date* tentang kaitan mata pelajaran dengan bidang kerja yang diminati peserta didik; (7) memahami perkembangan dunia industri atau perusahaan, sehingga dapat memberikan informasi yang luas kepada peserta didik tentang dunia kerja (tuntutan keahlian kerja, suasana kerja, persyaratan kerja, dan prospek kerja); (8) menampilkan pribadi yang matang, baik dalam aspek emosional, sosial, maupun moral-spiritual (hal ini penting, karena guru merupakan “figur central” bagi peserta didik); dan (9) memberikan informasi tentang cara-cara mempelajari mata pelajaran yang diberikannya secara efektif.
- d. Kolaborasi dengan Orang tua; Konselor perlu melakukan kerjasama dengan para orang tua peserta didik. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap peserta didik tidak hanya berlangsung di Sekolah/Madrasah, tetapi juga oleh orang tua di rumah. Melalui kerjasama ini memungkinkan terjadinya saling memberikan informasi, pengertian, dan tukar pikiran antar konselor dan orang tua dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik atau memecahkan masalah yang mungkin dihadapi peserta didik. Untuk melakukan kerjasama dengan orang tua ini, dapat dilakukan beberapa upaya, seperti: (1) kepala

- Sekolah/Madrasah atau komite Sekolah/Madrasah mengundang para orang tua untuk datang ke Sekolah/Madrasah (minimal satu semester satu kali), yang pelaksanaannya dapat bersamaan dengan pembagian rapor, (2) Sekolah/Madrasah memberikan informasi kepada orang tua (melalui surat) tentang kemajuan belajar atau masalah peserta didik, dan (3) orang tua diminta untuk melaporkan keadaan anaknya di rumah ke Sekolah/Madrasah, terutama menyangkut kegiatan belajar dan perilaku sehari-harinya.
- e. Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar Sekolah/Madrasah ; Yaitu berkaitan dengan upaya Sekolah/Madrasah untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang dipandang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan bimbingan. Jalinan kerjasama ini seperti dengan pihak-pihak (1) instansi pemerintah, (2) instansi swasta, (3) organisasi profesi, seperti ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia), (4) para ahli dalam bidang tertentu yang terkait, seperti psikolog, psikiater, dan dokter, (5) MGP (Musyawarah Guru Pembimbing), dan (6) Depnaker (dalam rangka analisis bursa kerja/lapangan pekerjaan).
 - f. Konsultasi; Konselor menerima pelayanan konsultasi bagi guru, orang tua, atau pihak pimpinan Sekolah/Madrasah yang terkait dengan upaya membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada para peserta didik, menciptakan lingkungan Sekolah/Madrasah yang kondusif bagi perkembangan peserta didik, melakukan referal, dan meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling.
 - g. Bimbingan Teman Sebaya (*Peer Guidance/Peer Facilitation*) ; Bimbingan teman sebaya ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peserta didik yang lainnya. Peserta didik yang menjadi pembimbing sebelumnya diberikan latihan atau pembinaan oleh konselor. Peserta didik yang menjadi pembimbing berfungsi sebagai mentor atau tutor yang membantu peserta didik lain dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, baik akademik maupun non-akademik. Di samping itu dia juga berfungsi sebagai mediator yang membantu konselor dengan cara memberikan informasi tentang kondisi, perkembangan, atau masalah peserta didik yang perlu mendapat pelayanan bantuan bimbingan atau konseling.
 - h. Konferensi Kasus; Yaitu kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik itu. Pertemuan konferensi kasus ini bersifat terbatas dan tertutup.

- i. Kunjungan Rumah; Yaitu kegiatan untuk memperoleh data atau keterangan tentang peserta didik tertentu yang sedang ditangani, dalam upaya meringankan masalahnya, melalui kunjungan ke rumahnya.

3. Perencanaan individual

Konselor membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu yang menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangan, atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier. Melalui kegiatan penilaian diri ini, peserta didik akan memiliki pemahaman, penerimaan, dan pengarahannya secara positif dan konstruktif. Pelayanan perencanaan individual ini dapat dilakukan juga melalui pelayanan penempatan (penjurusan, dan penyaluran), untuk membentuk peserta didik menempati posisi yang sesuai dengan bakat dan minatnya.

Konseli menggunakan informasi tentang pribadi, sosial, pendidikan dan karir yang diperolehnya untuk (1) merumuskan tujuan, dan merencanakan kegiatan (alternatif kegiatan) yang menunjang pengembangan dirinya, atau kegiatan yang berfungsi untuk memperbaiki kelemahan dirinya; (2) melakukan kegiatan yang sesuai dengan tujuan atau perencanaan yang telah ditetapkan, dan (3) mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukannya.

4. Dukungan sistem

- a. Pengembangan Profesi; Konselor secara terus menerus berusaha untuk “meng-update” pengetahuan dan keterampilannya melalui (1) *in-service training*, (2) aktif dalam organisasi profesi, (3) aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti seminar dan workshop (lokakarya), atau (4) melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi (Pascasarjana).
- b. Manajemen Program; Program pelayanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan tercipta, terselenggara, dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem manajemen yang bermutu, dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Oleh karena itu bimbingan dan konseling harus ditempatkan sebagai bagian terpadu dari seluruh program Sekolah/Madrasah dengan dukungan wajar baik dalam aspek ketersediaan sumber daya manusia (konselor), sarana, dan pembiayaan.



PENYUSUNAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING SEKOLAH

Melalui pemahaman dan penguasaan yang mendalam tentang asumsi pokok program BK yang bersifat komprehensif dan penjabaran dalam komponen-komponen program, maka konselor diharapkan dapat menyusun dan mengembangkan rencana aksi layanan BK dengan tujuan dan target terukur serta berdasarkan skala prioritas layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang konselor harus menyadari sepenuhnya bahwa tujuan-tujuan yang akan ditetapkan dalam perencanaan program BK harus menjadi bagian integral dari tujuan pendidikan nasional pada umumnya dan visi/misi yang ada di sekolah secara khusus. Dengan demikian, petugas bimbingan dan konseling mampu dengan tepat menentukan bagaimana cara yang efektif untuk mencapai tujuan beserta sarana-sarana yang diperlukannya.

1. BIMBINGAN DAN KONSELING SEBAGAI SISTEM DAN SUBSISTEM

Berdasarkan asumsi dasar tentang sifat menyeluruh (komprehensif) program BK, kegiatan BK merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling bertalian, sambung-menyambung, dan setiap bagian memiliki ikatan kesatuan dengan bagian yang lain yang berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu. Dengan demikian, kegiatan BK dapat dianggap sebagai subsistem dalam sistem pendidikan yang menjadi induknya. Rangkaian kegiatan BK pada akhirnya memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan rangkaian kegiatan sekolah lainnya.

BK sebagai suatu sistem memiliki tiga aspek utama (Gunawan, 2001), yakni:

- a. Tujuan yang hendak dicapai sebagai aspek utama yang harus ditentukan terlebih dahulu. Penetapan tujuan akan memudahkan konselor menentukan strategi yang akan dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud
- b. Kegiatan pokok yang menunjang langsung tercapainya tujuan. Bagian-bagian pokok dari suatu sistem dan strategi yang dikembangkan biasanya disebut sebagai penjabaran aktivitas dari suatu strategi yang di dalamnya terdapat

- aktivitas utama yang hendak dilakukan. Dengan kata lain, tercapainya tujuan hanya mungkin terjadi melalui implementasi kegiatan-kegiatan yang dimaksud. Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan sebaiknya dirumuskan secara tepat sasaran dan dengan dampak yang terukur
- c. Implementasi kegiatan (proses) atau berfungsinya isi dari suatu strategi yang mengarah pada pencapaian tujuan. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan semaksimal mungkin harus diusahakan dapat terlaksana sebaik mungkin.

Ketiga aspek dari program BK sebagai sistem tersebut saling berkaitan dan satu kesatuan organis yang berproses menuju tujuan layanan ataupun program yang hendak dicapai. Dalam rangka itu, modul materi ini bermuara pada fasilitasi keterampilan praktis bagi konselor tentang prosedur penyusunan program BK yang memperhatikan berbagai asumsi dasar dan komponen layanan yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. SISTEMATIKA DAN DISAIN PROGRAM BK SEKOLAH

Sistematika penyusunan dan pengembangan program BK Sekolah yang komprehensif pada dasarnya terdiri dari dua langkah besar, yaitu: a) pemetaan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan; dan b) desain program yang sesuai dengan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan. Adapun penjabaran dari tiap-tiap langkah besar sebagai berikut:

a. Pemetaan Kebutuhan, Masalah, dan Konteks Layanan

Penyusunan program BK di sekolah haruslah dimulai dari kegiatan asesmen (pengukuran, penilaian) atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program/layanan (Depdiknas, 2007). Kegiatan asesmen ini meliputi (1) asesmen konteks lingkungan program yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan dan tujuan sekolah, orangtua, masyarakat, dan stakeholder pendidikan terlibat, sarana dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, serta kebijakan pimpinan sekolah; (2) asesmen kebutuhan dan masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik peserta didik; seperti aspek fisik (kesehatan dan keberfungsian), kecerdasan, motivasi, sikap dan kebiasaan belajar, minat, masalah-masalah yang dihadapi, kepribadian, tugas perkembangan psikologis.

Melalui pemetaan ini diharapkan program dan layanan BK yang dikembangkan oleh konselor benar-benar dibutuhkan oleh seluruh segmen yang terlibat dan sesuai dengan konteks lingkungan program. Dengan kata lain, program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana per semester ataupun tahunan bukan sekedar tuntutan administratif, melainkan tuntutan tanggung jawab yang sungguh harus dilaksanakan secara

professional. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh konselor dalam memetakan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan:

- 1) Menyusun instrumen dan unit analisis penilaian kebutuhan. Eksplorasi peta kebutuhan, masalah, dan konteks membutuhkan instrument asesmen yang berfungsi sebagai alat bantu. Dalam instrumen ini, konselor merumuskan aspek dan indicator beserta item pernyataan/pertanyaan yang akan diukur dan jenis metode yang akan digunakan untuk mengungkap aspek dimaksud. Metode yang dapat digunakan, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya.
- 2) Implementasi penilaian kebutuhan. Pada tahap ini, konselor sesegera mungkin mengumpulkan data dengan menggunakan instrument yang telah dibuat sebelumnya dengan tujuan memperoleh gambaran kebutuhan dan konteks lingkungan yang akan dirumuskan ke dalam program lebih lanjut
- 3) Analisis hasil penilaian kebutuhan. Setelah data terkumpul, konselor mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi hasil penilaian yang diungkap dengan tujuan kebutuhan, masalah, dan konteks program dapat teridentifikasi dengan tepat
- 4) Pemetaan kebutuhan/permasalahan. Setelah hasil analisis dan identifikasi masalah terungkap, petugas BK dan konselor membuat peta kebutuhan/masalah yang dilengkapi dengan analisis faktor-faktor penyebab yang memunculkan kebutuhan/permasalahan

b. Desain Program BK dan Rencana Aksi (*Action Plan*)

Berikut ini adalah penjabaran rencana operasional (*action plan*) yang diperlukan *Action plan* yang akan disusun paling tidak memenuhi unsur 5W+1H (*what, why, where, who, when, and how*). Dengan demikian, konselor dan petugas bimbingan perlu melakukan hal-hal berikut ini:

- 1) Identifikasikan dan rumuskan berbagai kegiatan yang harus/perlu dilakukan. Kegiatan ini diturunkan dari perilaku/tugas perkembangan/kompetensi yang harus dikuasai peserta didik
- 2) Pertimbangkan porsi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan di atas. Apakah kegiatan itu dilakukan dalam waktu tertentu atau terus menerus. Berapa banyak waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam setiap komponen program perlu dirancang dengan cermat. Perencanaan waktu ini didasarkan kepada isi program dan dukungan manajemen

yang harus dilakukan oleh konselor. Berikut dikemukakan tabel alokasi waktu, sekedar perkiraan atau pedoman relatif dalam pengalokasian waktu untuk konselor dalam pelaksanaan komponen pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah.

TABEL 1. PERKIRAAN ALOKASI WAKTU PELAYANAN

KOMPONEN PELAYANAN	JENJANG PENDIDIKAN		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MAN/SMK
1. Pelayanan Dasar	45 – 55 %	35 – 45 %	25 – 35 %
2. Pelayanan Responsif	20 – 30 %	25 – 35 %	15 – 25 %
3. Pelayanan Perencanaan Individual dan keluarga	5 – 10 %	15 – 25 %	25 – 35 % (Porsi untuk SMK lebih besar)
4. Dukungan Sistem	10 – 15 %	10 – 15 %	10 – 15 %

- 3) Inventarisasi kebutuhan yang diperoleh dari *needs assessment* ke dalam tabel kebutuhan yang akan menjadi rencana kegiatan. Rencana kegiatan dimaksud dituangkan ke dalam rancangan jadwal kegiatan untuk selama satu tahun. Rancangan ini bisa dalam bentuk matrik; Program Tahunan dan Program semester.
- 4) Program bimbingan dan konseling Sekolah/Madrasah yang telah dituangkan ke dalam rencana kegiatan perlu dijadwalkan ke dalam bentuk kalender kegiatan. Kalender kegiatan mencakup kalender tahunan, bulanan, dan mingguan.
- 5) Program bimbingan dan konseling perlu dilaksanakan dalam bentuk (a) kontak langsung, dan (b) tanpa kontak langsung dengan peserta didik. Untuk kegiatan kontak langsung yang dilakukan secara klasikal di kelas (pelayanan dasar) perlu dialokasikan waktu terjadwal 2 (dua) jam pelajaran per-kelas per-minggu. Adapun kegiatan bimbingan tanpa kontak langsung dengan peserta didik dapat dilaksanakan melalui tulisan (seperti e-mail, buku-buku, brosur, atau majalah

dinding), kunjungan rumah (*home visit*), konferensi kasus (*case conference*), dan alih tangan (*referral*).

Program yang telah tersusun rapi dalam bentuk rincian aktivitas yang akan dilakukan tentunya membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh staff program tidak hanya petugas BK dan konselor, melainkan juga faktor kepemimpinan sekolah yang mendukung. Termasuk pula, keterlibatan guru bidang studi dalam memahami kerangka filosofis dan konseptual program serta layanan BK yang bersifat mendukung program pembelajaran. Melalui dukungan-dukungan tersebut, tujuan-tujuan layanan serta kompetensi yang akan dicapai mampu terwujud secara optimal.

LATIHAN-LATIHAN

1. Buatlah tabel sederhana yang mendeskripsikan hasil pemetaan kebutuhan dan masalah, serta konteks lingkungan pengembangan program. Isilah tabel tersebut dengan asumsi kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di sekolah Anda! (Diskusikan dalam kelompok!)
2. Setelah peta kebutuhan dan permasalahan dibuat, susunlah kegiatan operasional (*action plan*) dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan rincian pelaksanaan program yang akan dijalankan! (Diskusikan dalam kelompok)
3. Setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing!



EVALUASI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH

Pengertian Evaluasi Program BK

Konselor adalah pendidik seperti halnya guru mata pelajaran, namun ekspektasi kinerja konselor berbeda dengan guru mata pelajaran. Konselor harus tetap sadar bahwa rujukan normatif dari ekspektasi kinerjanya adalah “memandirikan konseli” dalam perkembangan belajar, sosial, pribadi dan karir melalui fasilitasi pengembangan berbagai kapasitasnya secara optimal (*optimum capacity development*). Layanan bimbingan dan konseling yang diampu oleh konselor bertujuan memandirikan individu yang normal dan sehat dalam menavigasi perjalanan hidupnya melalui pengambilan berbagai keputusan terbaik dalam perkembangan belajar, sosial, pribadi dan karir untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera dan peduli terhadap kemaslahatan umum.

Dalam upaya pemberian layanan bimbingan dan konseling di sekolah, konselor menyusun program BK. Berkaitan dengan layanan bimbingan dan konseling, konselor perlu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraan layanan bimbingan bagi peserta didik. Hal tersebut penting dilaksanakan karena program bimbingan dan konseling terdiri atas berbagai elemen dan komponen serta melibatkan banyak pihak yang harus disenergikan agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Untuk itu, program tersebut perlu dikelola secara sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (ABKIN, 2007; Gysbers & Henderson, 2006; Bowers & Hatch, 2002; Schmidt, 1999).

Program layanan BK tidak terlepas dari kegiatan pendidikan pada umumnya (menyangkut kurikulum, aktivitas pembelajaran, aktivitas penugasan, aktivitas pengerjaan proyek/tugas akademik, aktivitas pengembangan diri, dan sebagainya) yang kesemuanya melibatkan proses-proses mental siswa. Bidang-bidang layanan BK yang dikemas dalam ragam jenis layanan: pribadi, sosial, belajar, karir, Program BK dikembangkan melalui serangkaian proses sistematis sejak dari perencanaan, desain, implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan. Melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen

tersebut diharapkan kegiatan dan layanan BK dapat diselenggarakan secara tepat sasaran dan terukur.

Kegiatan untuk mengukur keberhasilan suatu program dikenal sebagai evaluasi program. Secara implisit batasan tersebut mengisyaratkan program sebagai kumpulan metode, keterampilan dan keperluan yang diperlukan untuk menetapkan apakah suatu layanan kemanusiaan diperlukan dan kemungkinan besar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi, dan yang sudah direncanakan (Fitri Artanti, 2007:21).

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program(Suharsimi Arikunto, 2004). Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Apabila kita membatasi pengertian “program” sebagai kegiatan yang direncanakan, maka program tersebut tidak lagi disebut demikian jika kegiatannya telah dilaksanakan. Namun, kalau kita amati dari kehidupan sehari-hari ada pula kegiatan yang dilaksanakan tanpa rencana. Evaluasi program biasanya dilakukan untuk kepentingan pengambil kebijakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Dengan melalui evaluasi program, langkah evaluasi bukan hanya dilakukan serampangan saja tetapi sistematis, rinci, dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Dengan menggunakan metode-metode tertentu maka akan diperoleh data yang handal dan dapat dipercaya. Penentuan kebijakan akan tepat apabila data yang digunakan sebagai dasar pertimbangan tersebut benar, akurat, dan lengkap.

Ada empat macam kebijakan lanjutan yang mungkin diambil setelah evaluasi program dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kegiatan tersebut dilanjutkan karena data yang terkumpul diketahui bahwa program ini sangat bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa hambatan sehingga kualitas pencapaian tujuannya tinggi.
- 2) Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penyempurnaan karena dari data yang terkumpul diketahui bahwa hasil program sangat bermanfaat tetapi pelaksanaannya kurang lancar atau kualitas pencapaian kurang tinggi. Yang perlu mendapat perhatian untuk kebijakan berikutnya adalah cara atau proses kegiatan pencapaian tujuan.

- 3) Kegiatan tersebut dimodifikasi karena data yang terkumpul dapat diketahui bahwa kemanfaatan hasil program tinggi sehingga perlu disusun lagi perencanaan secara lebih baik. Dalam hal ini mungkin tujuan yang perlu dirubah.
- 4) Kegiatan tersebut tiak dapat lagi dilanjutkan (dengan kata lain dihentikan) karena dari data yang terkumpul diketahui bahwa hasil program yang dikumpul diketahui kurang bermanfaat, ditambah lagi di dalam pelaksanaan sangat banyak hambatan.

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang evaluasi suatu program, kita perlu juga dengan memahami :

- a) Apa itu evaluasi program?
- b) Mengapa guru pembimbing perlu mengadakan evaluasi program?
- c) Apa saja objek atau sasaran dalam evaluasi program?
- d) Bagaimanakah cara melakukan evaluasi program?

Evaluasi program adalah proses yang sistematis yang menentukan kualitas dari program sekolah dan bagaimana program dapat diperbaiki (Sanders, 1992). Evaluasi program adalah sama dengan validitas konten. Validitas konten adalah menguji sistematika mengenai konten tes. Dalam kaitannya dengan program BK, muncul pertanyaan: “Adakah program tertulis secara komprehensif terimplementasi sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan wilayah, kabupaten/kota, nasional?. Evaluasi program mencakup apakah tersedia dokumentasi tertulis dan implementasi program tersebut dilaksanakan?

Sekolah dan sistem sekolah dapat mengembangkan standart/sasaran, kompetensi/indikator, hasil akhir dari kurikulum BK itu sendiri yang menuntun implementasi dari program pengembangan BK secara komprehensif. Program berdasarkan sekolah ini adalah untuk mengimplementasikan pengembangan layanan yang efektif dan konsisten. Bentuk program ini hanya mengindikasikan keberadaan program yang terencana bukan sebagai hasil (*outcomes*) dari program yang diimplementasikan.

Evaluasi hasil merupakan jawaban pertanyaan: “Apakah produk program menunjukkan hasil ? Sebagai catatan penting dalam mengakses program BK di sekolah bukan berfokus pada konselor sekolah atau pada kebebasan konselor. Ripley dkk, 2003 program asesmen yang dimaksud di sini adalah asesmen yang sistemik dan siklikal, yaitu

bagaimana menjawab pertanyaan suatu program bahwa pendidikan menjadi semakin baik bagi siswa melalui perbaikan kualitas secara terus menerus.

Dalam kaitannya dengan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, Amstramovich, Coker, & Hoskins (Gendon Barus:2010) menjelaskan, “ *Counsleing program evaluation refers to the ongoing use evaluation principles by counselors to assess and improve the effectiveness and impact of their programs and services* “. Evaluasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling memiliki nilai intrinsik dalam membantu konselor untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas layanan yang mereka berikan kepada para kliennya. Menurut Sink (2005), evaluasi program BK dapat membantu konselor untuk menentukan layanan-layanan mana yang member dampak positif kepada para peserta didik dan mengidentntifikasi hambatan-hambatan yang mengganggu kesuksesan peserta didik, serta menuntun konselor dalam merancang layanan-layanan yang efektif bagi peserta didik mereka.

Dalam kaitan dengan upaya perbaikan program, sangat tepat apa yang ditegaskan Sumarno, dkk, (2002) bahwa evaluasi merupakan langkah awal dalam perencanaan. Artinya, perencanaan untuk perbaikan program harus dimulai dari kegiatan evaluasi. Atas dasar itulah maka model evaluasi ini diawali dengan *needs assessment*, sebagai komponen pertama. Fakta empiris yang diperoleh dari hasil analisis *needs assessment* dapat menjadi masukan substantif berharga untuk mendasari penyusunan program Bimbingan dan konseling pada tahun berikutnya.

Apa yang menjadi focus pada evaluasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling, Gysbers dan Henderson (Sink, 2005:179) menegaskan bahwa evaluasi program bimbingan menjawab dua pertanyaan, yaitu (1) apakah sekolah memiliki program bimbingan dan konseling komprehensif secara tertulis? Dan (2) apakah program tertulis itu sungguh-sungguh terlaksana di sekolah tersebut? Evaluasi program bertujuan untuk menjelaskan bahwa program bimbingan yang tertulis tersebut secara teliti Gysbers, dalam *Missouri Comprehensive Guadince Program : A Manual for Program Development, Implementation, Evaluation, and Enhancement* (2006:42) menjelaskan, “ *Discrepancies between the written program and the implemented program, if sppresent, come into sharp focus as the program evaluation process unfolds*”.

Kriteria Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling

Penetapan kriteria relevan sebagai patokan dalam evaluasi program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan persoalan yang belum terpecahkan secara tuntas. Shertzers and Stone (Winkel & Sri Hastuti, 2004) menyebutkan sejumlah

ciri yang melekat pada pelayanan bimbingan dan konseling yang baik, namun ciri-ciri itu masih bersifat subjektif, dalam arti bersumber pada pandangan, pendapat, dan penafsiran oleh ahli bimbingan sendiri.

Winkel & Sri Hastuti (2004) menyarankan, evaluasi terhadap efektivitas pelayanan bimbingan dan konseling lebih valid dan reliabel jika pelaksanaan evaluasinya mendasarkan diri pada kriteria internal, antara lain yaitu : (1) pelayanan bimbingan disusun dengan bersumber pada kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang nyata dan realistis berdasar pada *needs assessment*; (2) sifat-sifat bimbingan yang menonjol adalah *preventif dan developmental*; (3) seluruh kegiatan bimbingan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah dirumuskan bersama seluruh tenaga pendidik dan orang tua berdasarkan suatu studi yang mendalam; (4) terdapat keseimbangan yang wajar antara layanan-layanan bimbingan, dengan mengingat kebutuhan objektif peserta didik manakah yang sebaiknya dilayani melalui layanan bimbingan tertentu; (5) para konselor sekolah dan para peserta didik saling mengenal dan peserta didik menggunakan berbagai layanan bimbingan .

Gendon Barus (2010) mengenalkan juga kriteria eksternal suatu layanan bimbingan daikatkan baik, jika ; (1) terdapat sekurang-kurangnya seorang tenaga ahli bimbingan (konselor sekolah) untuk melayani 250-300 orang peserta memadai dalam hal pendidikan prajabatan di bidang bimbingan dan konseling; (3) terselenggaranya system kartu pribadi (*cumulative record*) yang memuat himpunan data yang relevan untuk setiap peserta didik, yang dikelola dengan baik, dan digunakan secara actual dalam membverikan bimbingan kepada peserta didik'; (4) terdapat banyak sumber informasi pendidikan dan karir yang lengkap, mudah diakses, dan secara berkala diperbaharui; (5) tersedia dukungan sarana material dan teknis yang memadai; (6) pelayanan bimbingan menjangkau seluruh ppopulasi peserta didik; (7) terdapat suatu rencana pelayanan bimbingan dan konseling yang jelas, terstruktur, dan tertulis sebagai suatu pegangan semua pihak pelaksana.

Meskipun kesemua butir kriteria eksternal itu ada dan terevaluasi dalam keadaan baik, tetapiii belum ada jaminan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling sungguh-sungguh telah memberikan manfaat atau efek positif bagi perkembangan dan pemenuhan kebutuhan peserta didik. Evaluasii dilakukan untuk mengetahui efektivitas suatu program (pelayanan), dengan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keterlaksanaan program/pelayanan, bukan sekedar peninjauan terhadap hasil program (Suharsimi Arikunto, 2004). Apabila yang diacu hanya pencapain tujuan (hasil program), maka penetapan kiteria evaluasi akan merupakan pekerjaan yang mudah, namun itu baru

sebagian saja dari isu penetapan totalitas criteria evaluasi program yang kompleks (Tayibbinas, 2000).

Standards (AREA-APA, 1999;163) didefinisikan, *“Program evaluation is the set of procedures used to make judgements about the client need for a program, the way it is implemented, its effectiveness, and its value. “* Selanjutnya Tayibbinas (2000:4) menyarankan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan criteria penilaian suatu obyek/program ialah : (a) kebutuhan, ideal, nilai-nilai; (b) penggunaan optimal dari sumber-sumber dan kesempatan; (c) ketepatan efektivitas pelayanan/program; (d) pencapaian tujuan yang telah dirumuskan, dan tujuan penting lainnya.

Terdapat ciri yang melekat pada program BK. Ciri tersebut dapat dijadikan indikasi awal dalam menilai mutu program bimbingan. Ada ciri internal dan ada ciri eksternal dalam program bimbingan dan konseling.

a. Ciri eksternal

- 1) Rasio konselor. Beban kerja dengan perbandingan yang demikian memungkinkan seseorang konselor untuk memberikan layanan yang memadai.
- 2) Tenaga bimbingan memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan di bidang bimbingan dan konseling.
- 3) Program bimbingan dan konseling didukung oleh sarana material dan teknis yang mencukupi.
- 4) Pelayanan bimbingan dan konseling menjangkau seluruh populasi siswa dan tidak terbatas pada kelompok siswa atau tingkatan tertentu.
- 5) Memiliki rencana program yang jelas dan tertuang dalam suatu dokumen tertulis.

b. Ciri Internal

- 1) Program bimbingan dan konseling bersumber pada kebutuhan siswa yang nyata dan realistis ; mempertimbangkan tugas-tugas perkembangan siswa yang berkaitan dengan segi pribadi, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sekarang dan disusun melalui analisis corak kehidupan siswa dan masyarakat umumnya.
- 2) Sifat bimbingan yang menonjol adalah preventif dan developmental banyak pendampingan demi perkembangan siswa. Banyak kegiatan

bimbingan diberikan sebagai udaha pencegahan dan pendampingan demi perkembangan siswa. Bimbingan tidak terbatas layanan yang bersifat korektif saja (focus hanya pada siswa bermasalah saja).

- 3) Seluruh program diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sudah ditetapkan.
- 4) Berbagai layanan diberikan seimbang dengan memperhatikan rasio program.
- 5) Stabilitas pelayanan kepada siswa terjamin . Mundurnya salah seorang tidak mengakibatkan “kegoncangan” dalam pelayanan BK.
- 6) Terdapat flexibilitas dalam pengelolaan program perubahan yang diperlukan dapat direalisasikan tanpa menggoncangkan tenaga bimbingan atau membingungkan siswa.
- 7) Staf bimbingan memiliki semangat kerja yang tinggi; membuktikan pandangan.
- 8) Koordinator bimbingan membuktikan diriinya sebagai orang yang berkaulifikasi secara akademik dan mampu menkoordinasi seluruh program kegiatan dan mampu membina hubungan antar pribadi dengan rekan seprofesi.

Adanya ciri eksternal dan internal ini belum membuktikan bahwa program bimbingan benar-benar efisien dan efektif. Pembuktian efektivitas dan efisiensi program bimbingan harus mempertimbangkan kriteria yang selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh program bimbingan. Isi pokok kriteria tersebut ditentukan oleh staf bimbingan itu sendiri. Dengan demikian staf BK memiliki panduan untuk membentuk pendapat evaluatif mengenai program bimbingan yang dijalankan. Proses penetapan kriteria bisa dilakukan dengan mempelajari rumpun kriteria yang digunakan sekolah lain atau panduan yang sudah ada. Namun idealnya kriteria harus ditetapkan berdasar konteks sekolah itu sendiri.

Evaluasi program membutuhkan rumusan tujuan khusus dari kegiatan yang akan dievaluasi, hasil yang diharapkan, dan kriteria yang digunakan untuk menilai. Tiga hal itu harus dirumuskan secara realistik. Artinya rumusan yang dibuat harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada misalnya dengan mempertimbangkan sarana personal yang tersedia, waktu yang digunakan untuk kegiatan bimbingan, sarana material dan teknis yang dimiliki, dan dana yang dialokasikan untuk kegiatan bimbingan. Evaluasi program

formal bimbingan membutuhkan survai tentang layanan bimbingan yang tersedia, personal yang bekerja, fasilitas yang ada, jumlah waktu yang dialokasikan, dsb. Dana yang terkumpul melalui survai tersebut memberikan gambaran latar belakang situasi dan kondisi konkret program bimbingan. Kalau hal itu tidak diperhatikan, maka studi evaluative program bimbingan menjadi tidak realistik

Kelemahan-kelemahan program BK yang ditemukan melalui evaluasi produk sering bersumber pada keadaan yang tidak ideal. Apabila hal ini terjadi, maka usaha perbaikan program harus mempertimbangkan perubahan situasi dan kondisi terlebih dahulu. Apabila data dalam survai menunjukkan adanya keadaan tidak ideal, kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam evaluasi produk harus dicari sebabnya dalam proses membimbing-dibimbing melalui evaluasi proses.

Perubahan yang dihasilkan oleh program kerja bimbingan seringkali dapat berupa efek yang tidak langsung dituju. Perubahan tersebut merupakan hasil sampingan, misalnya, terjadi hubungan yang lebih baik antara staf guru dan para siswa setelah diadakan program remedial yang tujuan langsungnya adalah peningkatan kemampuan akademik siswa.

Metode dan alat evaluasi

Evaluasi formal, baik yang kuantitatif maupun kualitatif, membutuhkan alat dan metode untuk mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, dan menafsirkan data. Pengumpulan dan penyusunan data berkaitan dengan pengukuran. Sedang penafsiran menyangkut kesimpulan kualitatif atau pandangan evaluative.

Empat metode yang dapat diterapkan dalam evaluasi program meliputi survai, observasi, studi kasus, dan eksperimental. Setiap metode yang menggunakan alat yang dibutuhkan. Metode survai menggunakan alat berupa angket lisan atau tertulis. Metode observasi menggunakan daftar observasi. Metode studi kasus menggunakan format yang memuat aspek-aspek yang akan dipelajari tentang seorang atau sejumlah siswa. Dan metode eksperimental menggunakan daftar data yang memungkinkan perbandingan antara kelompok eksperimen dan kelompok control.

Pemilihan metode dan alat tergantung dari jenis data yang diperlukan. Misalnya dalam melakukan evaluasi untuk melihat proses perkembangan siswa, konselor menggunakan metode studi kasus. Evaluasi untuk melihat situasi dan kondisi lingkungan dilaksanakannya dengan menggunakan survai. Evaluasi untuk memastikan bahwa

suatu kegiatan memiliki efektivitas dalam membantu perubahan perilaku siswa dilakukan konselor dengan menggunakan eksperimental.

Evaluasi formal, baik yang kuantitatif maupun kualitatif, membutuhkan alat dan metode untuk mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, dan menafsirkan data. Pengumpulan dan penyusunan data berkaitan dengan pengukuran. Sedangkan penafsiran menyangkut kesimpulan kualitatif atau pandangan evaluative.

Empat metode yang dapat diterapkan dalam evaluasi program meliputi survei, observasi, studi kasus, dan eksperimental. Setiap metode yang menggunakan alat yang dibutuhkan. Metode survei menggunakan angket lisan atau tertulis. Metode observasi menggunakan daftar observasi. Metode studi kasus menggunakan format yang memuat aspek-aspek yang akan dipelajari tentang seorang atau sejumlah siswa. Dan metode eksperimental menggunakan daftar data yang memungkinkan perbandingan antara kelompok eksperimen dan kelompok control.

Pemilihan metode dan alat tergantung dari jenis data yang diperlukan. Misalnya dalam melakukan evaluasi untuk melihat proses perkembangan siswa, konselor menggunakan metode studi kasus. Evaluasi untuk melihat situasi dan kondisi lingkungan dilaksanakannya dengan menggunakan survei. Evaluasi untuk memastikan bahwa suatu kegiatan memiliki efektivitas dalam membantu perubahan perilaku siswa dilakukan konselor dengan menggunakan eksperimental.

Jenis Evaluasi

Evaluasi program mempunyai maka dan ruang lingkup yang lebih luas. Evaluasi program tersendiri terdiri beberapa jenis yang mana masing-masing jenis mempunyai tujuan dan sasaran tertentu dengan tujuan yang berbeda. Banyak ragam, Hamalik (2003:212), mengemukakan bahwa jenis-jenis evaluasi adalah sebagai berikut :

- a. Evaluasi perencanaan atau evaluasi pengembangan, sasaran utamanya adalah member bantuan kepada penyusun program dengan cara menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka mendesain program. Hasil evaluasi akan digunakan untuk meramalkan implementasi program dikemudian hari.
- b. Evaluasi monitoring dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa apakah program mencapai sasaran yang efektif. Apakah hal-hal kegiatan yang disusun secara spesifik dalam program itu terlaksana sebagaimana mestinya. Kenyataan tidak jarang justru mencapai sasaran karena apa yang telah didesain dalam program

tidak dilaksanakan berbagai alasan seperti pengadaan personal, fasilitas, perlengkapan, biaya dan faktor penyebab lainnya. Dengan demikian evaluasi monitoring program sangat penting dilakukan.

- c. Evaluasi dampak, bertujuan menilai seberapa jauh program dapat memberikan pengaruh tertentu pada sasaran yang ditetapkan, apakah program berdampak positif atau sebaliknya. Dampak tersebut dinilai berdasarkan kriteria-kriteria keberhasilan sehingga indikator tercapainya tujuan program, karenanya tujuan program tersebut perlu dispesifikasikan agar dapat diamati dan diukur setelah program tersebut dilaksanakan.
- d. Evaluasi efisiensi, dimaksudkan untuk menilai seberapa tingkat efisiensi suatu program. Apakah program mampu memberikan keuntungan memadai ditinjau dari segi biaya yang dikeluarkan, tenaga yang digunakan dan waktu yang terpakai.
- e. Evaluasi program komprehensif, yaitu dampak menyeluruh terhadap program yang meliputi Implementasi program, dampak atau pengaruhnya setelah program dilaksanakan dan tingkat efisiensi program.

Program Asesmen dan Evaluasi Bimbingan Konseling di Sekolah

Kebutuhan asesmen bagi konselor sekolah yang profesional dapat diperoleh melalui data terutama data input dari *stakeholders* di mana konselor sekolah yang profesional benar-benar merefleksikan kebutuhan khusus dari masyarakatnya karena apapun alasannya akuntabilitas public atas pertanggungjawaban kualitas pendidikan merupakan hasil dari asesmen dan evaluasi terhadap mutu layanan BK di sekolah. Meskipun sebenarnya mengevaluasi program BK agak kompleks karena tidak mudah mengevaluasi setiap layanan dan hasilnya (Repley, dkk 2003).

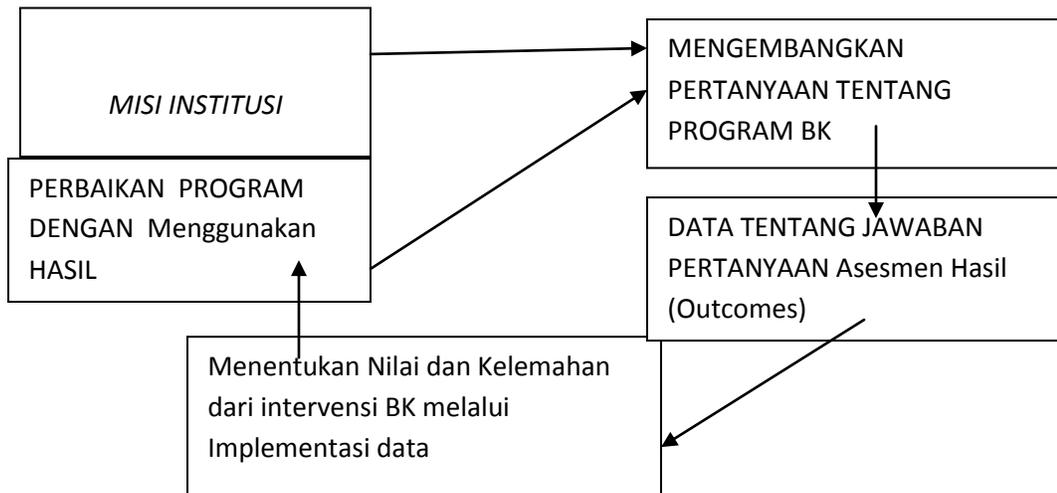
Dengan diperolehnya umpan balik dari siswa, guru, orang tua, administrator, tokoh masyarakat, konselor sekolah dapat mengembangkan program BK yang merefleksikan kebutuhan khusus dari masyarakatnya. Stone dan Bradley (1994) merekomendasikan enam tujuan evaluasi:

- 1) Mengukur keefektivan dari keseluruhan program dan kegiatannya;
- 2) Mengumpulkan data yang akan menentukan apakah memerlukan modifikasi program;
- 3) Menentukan tingkatan penerimaan program dan dukungan dari stakeholders;

- 4) Memperoleh informasi yang dapat digunakan oleh publik;
- 5) Mengumpulkan data untuk staf evaluasi
- 6) Menganalisis biaya program dan membandingkannya dengan kebutuhan program ke depan.

Hasil asesmen dan evaluasi program digunakan sebagai dokumen untuk mempelajari kekurangannya sekaligus memperbaiki program secara berkelanjutan (Repley, dkk 2003). Selanjutnya untuk menunjang program pendidikan yang komprehensif (Gybert dan Handerson, 2000) mencoba membaginya menjadi dua elemen kunci, yaitu (1) evaluasi program (proses); dan (2) evaluasi hasil (outcomes). Oleh karena proses asesmen bersifat sistematis dan siklikal, maka evaluasi program dan proses asesmen hasil dapat dimulai dari yang kecil hingga ke yang lebih luas. Metode ini menurut Erfond dkk (2006) adalah metode yang efektif bagi program konselor sekolah yang dilakukan secara berulang dengan mengikuti alur dan siklus yang sistematis secara terus menerus. Untuk memudahkannya Model Asesmen siklikal dan sistematis Erfond dkk diskemakan sebagai berikut:

Model Asesmen Siklikal dan Sistematis Erfond, dkk



Data dapat berasal dari sejumlah sumber yang berbeda termasuk fortopolio, penilaian dari luar, observasi, tes local, penilaian diri siswa, survey, wawancara, pengukuran informal atau standardisasi, performansi siswa atau hasil capai siswa.

Data dikumpulkan secara rutin di sekolah, diinterpretasi, disimpulkan kemungkinan pencapaian nilai program itu (kekuatannya, kelemahannya, hasilnya). Akhirnya sebelum proses siklus terjadi, interpretasi dan simpulan digunakan untuk menilai komponen program yang diperlukan. Sekali perubahan dibuat, pertanyaan baru dapat dimunculkan dan siklus baru dimulai, diinterpretasikan sebagai suatu proses yang terus menerus dalam memperbaiki kualitas program

Evaluasi hasil

Pertanyaan mengenai kekurangan dan keefektifan suatu hasil evaluasi berasal dari perpaduan dari nilai, kebutuhan, tujuan, misi di mana pertanyaan-pertanyaan itu untuk menentukan apakah data harus dihimpun. Ada dua metode utama untuk mendokumentasikan keefektifan program untuk konselor sekolah, yaitu (1) agregasi; dan (2) evaluasi hasil.

Agregasi merupakan proses perpaduan dari potongan-potongan data yang lebih kecil yang mendukung dokumen komponen program yang lebih luas pengembangan kurikulum program BK yang komprehensif didasarkan pada beberapa system hirarkhis yang biasanya mencakup standar (sasaran), kompetensi (*indicator*), dan hasil (*outcomes*).

Secara ringkas, proses agregasi di atas menunjukkan bahwa menentukan program BK sekolah yang efektif dimulai dengan mempelajari hasil (*outcomes*) tertulis dalam namun juga dihadapkan pada setting yang menantang. Laporan temuan asesmen dan evaluasi ditujukan kepada administrator (Kepala Sekolah, Diknas Kab/Kota), anggota staf, orang tua, siswa, stakeholders lainnya. Komite penesehat BK di sekolah dan Konselo Sekolah dilibatkan dalam setiap tahapan proses pelaporan. Secara umum, laporan komprehensif akan membantu untuk analisis program dan membuat keputusan.

Untuk melengkapi kemampuan konselor sekolah dalam melakukan evaluasi dan asesmen program BK di sekolah, Elmore dan Ekstrom (2006) memaparkan delapan kompetensi konselor:

- 1) Konselor sekolah terampil dalam memilih strategi asesmen;
- 2) Konselor sekolah mampu mengidentifikasi, mengakses, dan mengevaluasi semua instrument asesmen yang digunakan;
- 3) Konselor sekolah terampil dalam menggunakan teknik administrasi dan metode penskoran instrument asesmen;

- 4) Konselor sekolah terampil dalam menginterpretasikan dan melaporkan hasil asesmen;
- 5) Konselor sekolah terampil menggunakan hasil asesmen dan membuat keputusan;
- 6) Konselor sekolah terampil memproduksi, menginterpretasi, dan menyajikan informasi hasil asesmen secara statistical;
- 7) Konselor sekolah terampil memproduksi, menginterpretasi, dan menyajikan infor dan menggunakan angket, survey, dan asesmen lainnya untuk kebutuhan local/wilayah sekolahnya;
- 8) Konselor sekolah memahami bagaimana mempertanggungjawabkan praktik-praktik evaluasi secara professional.

Sedangkan untuk merencanakan dan mengevaluasi program BK di sekolah Elmore dan Ekstrom menyarankan tujuh keterampilan konselor sekolah:

- 1) Menyeleksi, mengadministrasi, dan menginterpretasi instrument yang akan digunakan dalam konseling ;
- 2) Membaca atau merujuk pada tes yang standar;
- 3) Menyeleksi instrument asesmen (untuk konseling kelompok dan konseling individual)
- 4) Menginterpretasi data kebutuhan asesmen dan perencanaan program asesmen BK
- 5) Menyeleksi instrument asesmen yang akan digunakan dalam merencanakan dan mengevaluasi program BK
- 6) Mengadaptasi, merancang survey, atau instrument lainnya untuk perencanaan program dan evaluasi program BK.
- 7) Merancang dan mengimplementasi kumpulan data yang digunakan dalam perencanaan dan evaluasi program.

Langkah-langkah Evaluasi

Apa yang dilakukan oleh guru pembimbing atau konselor di sekolah dalam mengevaluasi program bimbingan dan konseling adalah dengan cara mengumpulkan data dari

berbagai kegiatan layanan yang telah dilakukan berdasarkan program yang telah disusun. Oleh karena itu agar pelaksanaan evaluasi program layanan bimbingan dan konseling dapat dipertanggungjawabkan perlu data, yang kemudian dapat dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasil evaluasinya. Agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan tepat, perlu memperhatikan prosedur atau langkah-langkah yang ditempuhnya. Pelaksanaan evaluasi program ditempuh dengan cara sebagai berikut (Depdiknas, 2007);

- a. Merumuskan masalah atau instrumentasi. Pada prinsipnya mengevaluasi program adalah memperoleh data yang diperlukan dalam mengambil keputusan, maka dalam mengevaluasi konselor perlu menyiapkan instrument yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan berdasar program yang disusun. Pada dasarnya terkait dengan dua aspek pokok yang perlu dievaluasi yaitu; (1) tingkat keterlaksanaan program/pelayanan yaitu aspek proses dan (2) tingkat ketercapaian program/pelayanan yaitu aspek hasil.
- b. Mengembangkan atau menyusun pengumpul data. Untuk memperoleh yang diperlukan, yaitu mengenai tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian program, maka konselor perlu menyusun instrument relevan dengan kedua aspek tersebut. Instrumen itu antara lain angket, pedoman wawancara, pedoman observasi, studi dokumentasi dsb.
- c. Mengumpulkan dan menganalisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis, dari hasil analisis data akan dapat diketahui program-program mana yang terlaksana dan mana yang tidak, yang terlaksana dengan adanya hambatan, tujuan kegiatan-kegiatan yang adanya hambatan, tujuan kegiatan-kegiatan yang telah dan belum tercapai.

Melakukan tindak lanjut (follow up). Berdasarkan hasil-hasil dan temuan yang diperoleh, maka dapat dilakukan tindak lanjut. Tindak lanjut dapat berupa perbaikan-perbaikan program dan dapat berupa pengembangan program. Perbaikan program dapat dilakukan dengan memperbaiki berbagai hal yang dipandang lemah, kurang baik berbagai hal yang dipandang lemah, kurang tepat, kurang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengembangan program dapat dilakukan dengan cara mengubah atau menambah beberapa hal yang dipandang dapat meningkatkan kualitas atau efektifitas program.

Latihan dan Tugas

A. Tugas

1. Buatlah kelompok 5 sampai 10 konselor dari sekolah yang berbeda dengan melibatkan sejumlah siswa dari masing-masing sekolah tersebut.
2. Konselor (penyusun program) menjelaskan maksud program layanan yang telah disusun dan dikembangkan di sekolahnya masing-masing.
3. Konselor secara aktif mendorong peserta untuk mengikuti kegiatan diskusi sebaik-baiknya dalam waktu yang telah ditentukan. Sesuaikan dengan materi layanan dan metode untuk melibatkan peserta bersamanya dan mendiskusikan masing-masing peserta diminta memberikan masukan dan saran .
4. Penyusun program mendorong peserta untuk memberikan komentar dengan leluasa tentang kegiatan yang diikutinya terutama materi layanan. Keterampilan pemateri dalam berinteraksi dan berwawancara dengan peserta akan menentukan kualitas informasi yang diperolehnya. Konselor harus menempatkan diri dan bersikap untuk berusaha memahami komentar peserta tentang bahan yang telah disusunnya tanpa merasa tersinggung , apalagi mempertahankannya tanpa didasari alasan yang rasional dan akademis. Tanpa sikap positif seperti itu usaha evaluasi program akan sia-sia.
5. Penyusun mencatat komentar peserta dan menyimpulkan implikasinya terhadap perbaikan kegiatan secara keseluruhan termasuk pada bahan atau metodenya.
6. Dari hasil ini kembangkan pertanyaan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang :
 - a) Seberapa siswa memahami materi layanan yang baru ini?
 - b) Apakah kegiatan layanan itu menarik dan sistematis?
 - c) Bagian mana dari materi layanan tersebut yang sulit dipahami dan mengapa?
 - d) Apakah ada alat evaluasi (dengan tes atau non tes) di tiap materi yang tidak relevan dengan materi yang disajikan?

B. Latihan

1. Siapa yang akan menggunakan hasil evaluasi program bimbingan dan konseling?
2. Apakah sumber-sumber di bawah ini juga perlu dievaluasi? Jelaskan !
 - a) Fasilitas, alat-alat dan waktu;
 - b) Tenaga pelaksana evaluasi;
 - c) Instrumen evaluasi seperti kuisisioner, pedoman interviu, check-list, tes, skala, sikap dan sebagainya;
 - d) Responden;
 - e) Biaya.
3. Bagaimana bentuk laporan evaluasi? Perlukah laporan lisan di samping laporan tertulis? Laporan tersebut harus disampaikan kepada siapa?

Daftar referensi

- Bowers, J. L. & Hatch, P. A. (2000). *The National Model for School Counseling Programs*. American School Counselor Association
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal*. Bandung: Penerbit UPI
- Galassi, J. P. & Akos, P. (2004). Developmental Advocacy: Twenty-First Century School Counseling, *Journal of Counseling and Development*, Vol. 82, 2004, p. 146-157
- Gunawan, Y. (2001). *Pengantar Bimbingan dan Konseling; Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Prehallindo
- Gysbers, N. C. & Henderson, P. (2006). *Developing & Managing Your School Guidance and Counseling Program*. Alexandria: American Counseling Association
- Kartadinata, S. (1999). Quality Improvement and Management System Development of School Guidance and Counseling Services, *the Journal of Education*, Vol. 6, December, 1999
- Kartadinata, S. (2003). Bimbingan dan Konseling Perkembangan; Pendekatan Alternatif Bagi Perbaikan Mutu dan Sistem Manajemen Layanan Bimbingan dan Konseling Sekolah. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. VI/11 Mei 2003
- Ming, L. K., et. al. (2004). *Counselling in Schools; Theories, Processes, and Techniques*. Edited by Esther Tan. Singapore: McGraw-Hill Education (Asia)
- Erford, B. T., Mc Kechnie, J.A., & Moore-Thomas, C., (2006). Program Assessment and Evaluation dalam (Bradley T. Erford, Ed). "Professional school counseling Texas: Caps Press.
- Elmore, P. B., & Ekstrom, R. B., (2006). What Assessment Competencies Are Needed by Professional School Counselors? dalam (Bradley T. Erford, Ed). "Professional school counseling Texas: Caps Press.
- Gendon Barus. (2010) Pengembangan Model Evaluasi Pelayanan Bimbingan dan Konseling Di Sekolah Dasar. Program PAsca Sarjana Universitas Yogyakarta
- Gysbers, N. C., & Handerson, P., (2000). *Developing and managing your school counseling program*. (3^{ed} ed.). Alexandria, VA: American Counseling Association.
- M. Atwi Suparman (2001) Desain Instruksional. Pusat antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Intruksional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta : PAU-PPAI, Universitas Teruka

Ripley, V., Erford, B. T., Dahir, C., & Eschbach, L., (2003). Planning and implementing a 21st *Transforming the school counseling profession*. Columbus, OH: Merrill/Prentice-Hall.

Sanders, L., (1992). *Evaluating school programs: An educator's guide*. Newbury Park, CA: Corwin Press.

Stone, L. A., & Bradley, F.O., (1994). *Foundation of elementary and middle school counseling*. White Plains, NY: Longman.

Sumarno, dkk (2002). Pengembangan Model Akreditasi Sekolah tingkat SLTP dan SMU. *Jurnal Kependidikan*, 2:23, 249-268

Tayibnapi, Farida Yusuf. (2000) *Evaluasi Program*. Jakarta. Rineka Cipta

Winkel, W.S. & Sri Hastuti, (2004). *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: Gramedia